

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Literasi keuangan (*Financial Literacy*) dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi isu terhangat yang diperbincangkan pada berbagai belahan dunia. Hal tersebut dikarenakan setiap negara berkeinginan agar masyarakat memiliki pola pikir dalam mengelola dan mengatur keuangan baik secara pribadi maupun dalam pengelolaan usaha. Seiring meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan diiringi perkembangan pasar keuangan, maka pemahaman akan literasi keuangan menjadi hal yang penting demi menciptakan masyarakat yang berkualitas (Hambali. 2018).

Pemahaman akan literasi keuangan semakin diperlukan demi terciptanya penduduk berkualitas yang memiliki kecerdasan finansial, masyarakat dituntut bukan hanya menguasai secara teori namun juga harus mampu menguasai secara praktek. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), dinyatakan bahwa literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk memperoleh kesejahteraan dengan sikap dan perilaku yang meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan melalui pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan.

Hasil survey yang dilaksanakan pada Tahun 2003 sesuai dengan rilis berita pada Katadata.co.id (2023) menunjukkan bahwa trend Kemampuan Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia saat ini telah mengalami peningkatan dari 66,5 poin pada Tahun 2020 menjadi 69,7 poin di Tahun 2023.

Ada tiga komponen penilaian literasi keuangan. Pertama, perilaku keuangan (*Behavior*) dengan skor 34,3 poin dari skala 0-45 poin atau mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2020 hanya 31,5 poin. Kedua, pengetahuan keuangan (*Knowledge*) sebesar 23,3 poin dari skala 0-35 poin atau meningkat dari 18,5 poin di Tahun 2020 . Ketiga, sikap terkait keuangan (*Attitude*) sebesar 12,1 poin dari skala 0-20 poin atau telah mengalami peningkatan dari 16,5 poin pada 2020.

Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Ketiga Tahun 2022, dimana tingkat kemampuan Literasi Keuangan Masyarakat saat ini telah mencapai angka 49,68% sementara untuk inklusi keuangan berada dipersentase 85,10% artinya bahwa masih terdapat Gap sebesar 35,43% antara tingkat ketersediaan akses dari lembaga keuangan dengan tingkat pengetahuan tentang literasi keuangan masyarakat.

Hasil survey OJK Tahun 2022 juga merilis perbandingan tingkat Literasi Keuangan untuk masyarakat yang ada dipedesaan, dimana dari survey tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat desa

jauh berada di bawah tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan dari Masyarakat yang ada diperkotaan. Tentunya dengan kondisi ini memiliki dampak terhadap berbagai permasalahan terkait dengan program yang digelontorkan oleh pemerintah guna memberi dukungan terhadap pembangunan di desa.

Mardiyatun (2020) mengemukakan bahwa permasalahan tentang Tingkat Literasi Keuangan khususnya di desa, tentunya memiliki keterkaitan sangat erat dengan kebijakan pembangunan yang sejak Tahun 2015 diinisiasi pelaksanaannya dimulai dari daerah pedesaan, sehingga untuk dapat mencapai sasaran perumusan kebijakan pembangunan pedesaan maka sangat perlu diadakan program yang menekankan kontrol oleh masyarakat setempat serta manajemen sumber-sumber setempat. Olehnya itu Kemampuan Literasi Keuangan menjadi salah satu hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini.

Desa yang ada saat ini sebagai produk era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Olehnya itu menurut Iyan et al., (2020) bahwa Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 Undang-Undang Desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dimanan kesemua ini hanya akan dapat tercapai jika tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat telah memadai.

Maklumat yang dituangkan dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan BUMDes, dimana dalam aturan ini ditekankan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebageian besar modalnya dimiliki oleh Desa ataupun masyarakat melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa maupun dalam bnetuk investasi guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes sebagai Lembaga usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, tentunya BUMDes menurut Restia Christianty (2023) memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pengembangan usaha, dimana usaha-usaha tersebut secara umum dan sesuai amanah undang-undang serta tujuan keberadaannya di Desa dapat berupa usaha dalam bentuk Pelayanan Umum (*Serving*), Perdagangan (*Trading*), Bisnis Uang (*Banking*), Usaha Bersama (*Holding*), Lembaga Perantara (*Brokering*), dan Bisnis Penyewaan (*Renting*).

Mempertegas maksud tersebut oleh Dudi Irawan (2023) juga menambahkan bahwa untuk dapat melakukan pengembangan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh BUMDES dengan berbagai alternatif jenis usaha sebagaimana diamanahkan oleh aturan perundang-undangan, maka hal mendasar yang dibutuhkan yakni pengembangan terhadap tingkat pemahaman terhadap Literasi Keuangan bukan hanya pada pengurus BUMDES namun secara lebih luas juga terhadap masyarakat, sebab dalam pengelolaan serta pengembangan usaha BUMDes secara langsung masyarakat memiliki peranan yang sangat penting.

Keberadaan BUMDES sebagai salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi dipedesaan di beberapa tempat pada dasarnya telah mampu berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, namun di beberapa tempat lainnya masih belum mampu berjalan secara optimal. Iit Novita Riyanti (2021) dalam kajian penelitiannya menyatakan bahwa dari 45.549 BUMDES yang telah dibentuk sampai dengan Tahun 2019 terdapat 2.186 (4,8%) BUMDes dinyatakan tidak berjalan atau tidak aktif lagi, sementara yang dikategorikan belum mampu memberikan kontribusi pada pemerintah desa khususnya dibidang ekonomi diperkirakan sebanyak 16.397 BUMDes.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh rata-rata BUMDes sehingga tidak mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya

secara maksimal menurut Syahrul Efendi (2019) penyebabnya karena tingkat kemampuan SDM yang rendah, baik dalam hal pengembangan usaha demikian pula terhadap sistem tata kelola keuangan serta dukungan dari masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman tentang Literasi Keuangan masih sangat rendah sehingga sulit melibatkan diri dalam pengembangan usaha BUMDes.

Menyikapi hal tersebut Akhmad S (2020) mengemukakan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung BUMDes agar mampu melakukan peningkatan dalam hal produktivitas usaha, yakni dengan mengembangkan berbagai bentuk inovasi-inovasi usaha dengan tetap memperhatikan potensi yang dimiliki oleh sebuah Desa serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan, sikap dan perilaku keuangan, sehingga mampu memberikan keputusan dalam mendukung pengembangan usaha BUMDes.

Pentingnya kemampuan literasi keuangan bagi masyarakat dalam mendukung pengembangan usaha BUMDes sebab menurut Otoritas Jasa Keuangan (2020) bahwa makna yang terkandung dalam Literasi Keuangan (*Finanacial Literacy*) yakni serangkaian Pengetahuan (*Knowledge*), Kepercayaan (*Confidence*), dan Keterampilan (*Skill*), yang mempengaruhi Sikap (*Attitude*) dan Perilaku Pengelolaan (*Management Behavior*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Safryani (2020) juga menegaskan bahwa Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) dapat pula dimaknai sebagai sebuah bentuk rencana jangka pendek dan jangka panjang yang didasarkan pada pengetahuan keuangan dan konsep keuangan umum yang terkait dengan kemampuan untuk membuat keputusan terhadap penggunaan instrument keuangan dalam pengelolaan keuangan individu atau suatu lembaga.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar dari tingkat Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) terhadap permasalahan pengetahuan keuangan dimana hal ini juga menjadi gambaran tentang persoalan yang ada dimasyarakat pedesaan, dimana oleh Laily (2021) mengemukakan bahwa jika seseorang telah memiliki pengetahuan keuangan yang baik tentunya akan berdampak pula pada kemampuan mereka dalam mengambil keputusan terhadap pengelolaan keuangan yang nantinya dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Mempertegas pandangan tersebut oleh Dudi Irawan (2023) dalam pendampingan tentang Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) pada sebuah BUMDes menyatakan bahwa persoalan utama yang ditemui dilapangan dimana tingkat pemahaman tentang Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) baik oleh pengelola BUMDes maupun masyarakat masih sangat rendah, sehingga pemahaman yang dimiliki

hubungannya dengan pengelolaan keuangan dapat dikatakan masih berpedoman pada pola-pola tradisional.

Rendahnya tingkat pengetahuan dari masyarakat dan juga BUMDes tentunya sangat berimbas pada Sikap Keuangan (*Financial Atitude*) mereka, dimana pemberlakuan atau perilaku terhadap uang dapat dikatakan buruk, hal ini ditegaskan oleh Sartika (2020) bahwa Sikap Keuangan (*Financial Atitude*) merupakan unsur yang menjadi salah satu pemicu dari niat untuk berperilaku sehingga berdampak pada tingkat Perilaku Keuangan (*Financial Behaviour*) seseorang. Penjabaran ini dapat diartikan bahwa Sikap Keuangan (*Financial Atitude*) secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi Perilaku Keuangan (*Financial Behaviour*).

Sikap Keuangan (*Financial Atitude*) dalam penelitian tersebut terkadang digambarkan hanya sebatas “Niat”, akan tetapi hal ini memiliki pengaruh cukup besar terhadap perilaku masyarakat, dimana jika niat dari masyarakat mengarah ke positif, maka secara otomatis Perilaku Keuangan (*Financial Behaviour*) akan baik pula terhadap pengelolaan keuangan. Permasalahannya kembali pada persoalan *Knowledge Financial* atau Pengetahuan Keuangan masyarakat, sebab timbulnya niat bersifat negatif dalam berperilaku terhadap pengelolaan keuangan dikarenakan mereka tidak memiliki pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan yang baik.

Gambaran terhadap fenomena terkait dengan tingkat Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) yang dapat dikatakan masih rendah dikalangan masyarakat pedesaan maka hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab kondisi tersebut juga ditemukan pada pola pemberlakuan keuangan pada sebahagian masyarakat Desa Rosoan. BUMDes di desa ini melalui beberapa usaha yang tengah dikembangkan dapat dilihat perkembangannya tidaklah signifikan, walaupun telah mampu memberikan partisipasi terhadap PADes, namun nilainya masih sangatlah kecil.

Sementara disisi lain dapat dilihat bahwa tingkat penghasilan masyarakat yang rata-rata adalah petani dapat dikatakan cukup lumayan, namun perhatian mereka terhadap peningkatan usaha yang dikelola oleh BUMDes masih sangat rendah, padahal dari gambaran potensi dari desa ini, masih banyak yang dapat dijadikan produk usaha untuk BUMDes, demikian pula dalam hal dukungan terhadap usaha usaha unggulan mereka, dimana tingkat ketersediaan bahan baku masih terbatas, tentunya hal ini dapat pula dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan dari masyarakat.

Menyikapi fenomena tersebut dan mencermati perkembangan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rosoan, maka kajian tentang Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) dalam penelitian ini akan difokuskan untuk melihat hubungan pengaruh dari kemampuan Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) Masyarakat

khususnya yang berkaitan dengan Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*), Sikap Keuangan (*Financial Atitude*) dan Perilaku Keuangan (*Financial Behaviour*) dalam mendukung Pengembangan Usaha BUMDes. Berdasar pada uraian tersebut, maka dalam penelitian ini judul yang akan dikaji : **“TINGKAT LITERASI KEUANGAN PENGELOLA BUMDES DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA BUMDES DESA ROSOAN KABUPATEN ENREKANG”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan pengelola BUMDES di Desa Rosoan Kabupaten Enrekang?
2. Sejauh mana literasi keuangan pengelola BUMDES dalam keberhasilan pengembangan usaha di BUMDES Desa Rosoan Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada focus penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Menilai tingkat literasi keuangan pengelolaan BUMDES di Desa Rosoan Kabupaten Enrekang.
1. Menganalisis dampak literasi keuangan pengelola BUMDes dalam keberhasilan pengembangan usaha di BUMDes Desa Rosoan Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan literasi: penelitian ini akan menambah khazanah literature terkait literasi keuangan, khususnya dalam konteks pengelolaan BUMDes. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi studi-studi berikutnya yang membahas hubungan antara literasi keuangan dan efektivitas pengelolaan BUMDes.
- b. Penerapan Teori Ekonomi: Penelitian dapat membantu dalam memahami bagaimana teori-teori ekonomi, terutama yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan pengembangan usaha. ditetapkan dalam konteks BUMDes, ini memberikan dasar untuk pengembangan teori yang lebih baik dalam literasi keuangan di sektor Desa.
- c. Model Analisa Keuangan: Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan model analisis literasi keuangan yang dapat diadaptasi atau dikembangkan lebih lanjut untuk pengelola BUMDes di daerah lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Peningkatan Kapasitas pengelolaan BUMDES: penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan literasi keuangan pengelola BUMDes di Desa Rosoan. ini mencakup pengetahuan tentang pengelolaan anggaran laporan keuangan dan perencanaan investasi.

- b. Kontribusi pada Literasi Akademik: Hasil penelitian akan memberikan kontribusi pada literature akademik mengenai literasi keuangan dan manajemen BUMDES, khususnya dalam konteks daerah pedesaan di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi-studi selanjutnya yang mengeksplorasi hubungan antara literasi keuangan dan kinerja usaha di BUMDES.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Literasi Keuangan (*Financial Literacy*)

a. Definisi Literasi Keuangan (*Financial Literacy*)

Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) menurut Rustandi Kartawinata (2018) adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh individu yang didasarkan pada kemampuan untuk mengelola pendapatan. Selanjutnya oleh Pulungan, (2019) menyatakan bahwa Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) adalah kombinasi kebutuhan akan kesadaran, pengetahuan, keahlian, etika, dan sikap dalam membuat keputusan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan individu.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat i Briliani (2020) menyatakan bahwa Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) ialah suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap individu untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan upaya pemahaman terhadap perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan yang tepat dan efisien.

Sementara menurut Aprinhasari, & Widiyanto (2020) bahwa Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) adalah sebuah keterampilan numerik yang diperlukan dan pemahaman terhadap konsep dasar ekonomi yang dibutuhkan untuk

mendidik dalam keputusan menyimpan dan meminjam. Safryani A (2020) mendefinisikan Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) adalah kemampuan untuk membuat penilaian-penilaian terinformasi dan untuk mengambil keputusan secara efektif berdasarkan kegunaan dan pengelolaan keuangan.

Mepertegas semua bentuk pengertian tentang Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) dari berbagai pandangan para ahli, sehingga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 diuraikan bahwa Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) terdiri dari Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*), Keterampilan dalam Pengelolaan Keuangan (*Financial Skill*) dan Keyakinan dalam Penggunaan Keuangan (*Financial Confidence*) yang mempengaruhi Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) dan Perilaku Manajemen Keuangan (*Financial Management Behavior*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan

b. Pilar Utama Literasi Keuangan (*Financial Literacy*)

Otoritas Jasa Keuangan (2022) menyatakan bahwa secara defenisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah “kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang”. Sehingga misi

penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan resikonya.

Untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, maka program strategi nasional literasi keuangan mencanangkan empat pilar utama yaitu :

1) *Well Literate*

Kategori ini menggolongkan masyarakat telah memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan serta produk jasa keuangan, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2) *Sufficient Literate*

Kategori ini menggolongkan masyarakat telah memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk jasa keuangan.

3) *Less Literate*

Kategori ini menggolongkan masyarakat hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4) *Not Literate*

Kategori ini menggolongkan masyarakat tidak atau belum memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Penerapan keempat pilar tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.

c. Tujuan Literasi Keuangan (*Financial Literacy*)

Tujuan dari literasi keuangan menurut pandangan dari Yuwan Lestari, (2020) adalah melakukan edukasi dibidang keuangan kepada seluruh masyarakat supaya dapat mengelola keuangan dengan cerdas dan menaikan akses informasi dan penggunaan produk dan jasa keuangan dengan melibatkan infrastruktur pendukung literasi keuangan. Sementara menurut Koto (2021) tujuan dari Literasi Keuangan

adalah agar dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dan memiliki kesejahteraan finansial di masa depan.

Adapun tujuan Literasi Keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022) yakni :

- 1) Mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.

Membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih baik, khususnya terhadap perencanaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang menjadi lebih baik dan efektif.

Tujuan jangka pendek yang dimaksud seperti membayar tagihan atau membeli kendaraan. Sementara untuk tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, pendidikan anak, pensiun, atau investasi.

- 2) Mengurangi Risiko Keuangan

Salah satu dampak buruk dari kurangnya literasi adalah risiko keuangan yang tinggi. Risiko ini berupa hutang berlebih, investasi buruk, atau keputusan keuangan yang salah. Jadi, memiliki banyak literasi, maka seseorang dapat memahami risiko keuangan yang ada dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Misalnya, meminimalkan hutang dengan memperbaiki kebiasaan pengeluaran,

memilih jenis investasi, atau memperhatikan asuransi, dan membuat laporan keuangan.

3) Meningkatkan Kesadaran dan Kepercayaan Diri

Lingkungan yang kompleks dan berubah seperti saat ini, banyak individu dan keluarga merasa kesulitan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Jika memiliki literasi keuangan yang baik, maka seseorang bias meningkatkan kesadaran dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dan efektif. Misalnya, membandingkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan, memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka, atau membuat rencana keuangan untuk masa depan.

4) Membangun Kebiasaan Keuangan yang Sehat

Literasi juga dapat membantu Anda untuk membangun kebiasaan keuangan yang produktif sehingga mampu membuat keputusan yang lebih cerdas dan bijak.

Misalnya, memperbaiki manajemen keuangan sehari-hari, menghindari hutang berlebih, atau menabung untuk keperluan yang lebih penting di masa depan. Secara keseluruhan, literasi juga memungkinkan untuk mencapai tujuan keuangan, mengurangi risiko, meningkatkan

kesadaran, dan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan.

5) Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas di Tempat Kerja

Karyawan yang memiliki literasi baik dapat mengelola gaji dan tunjangan, menghemat uang untuk masa depan, dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Hal ini akan membantu Anda agar fokus bekerja dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

6) Membangun Keterlibatan Dalam Sistem Keuangan

Pada lingkungan keuangan yang kompleks, literasi keuangan dapat membantu untuk memahami bagaimana sistem keuangan bekerja dan bagaimana mereka terlibat dalamnya dengan lebih efektif.

7) Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Secara Umum

Ketika banyak orang memiliki pengetahuan dan keterampilan keuangan yang baik, maka mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih efektif dan pada akhirnya mengurangi risiko keuangan serta memperkuat ekonomi secara keseluruhan.

d. Komponen Literasi Keuangan (*Financial Literacy*)

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 bahwa Literasi Keuangan (*Finanacial Literacy*) terdiri dari Pengetahuan Keuangan (*Financial Konowledge*),

Keterampilan dalam Pengelolaan Keuangan (*Financial Skill*) dan Keyakinan dalam Penggunaan Keuangan (*Financial Confidence*) yang mempengaruhi Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) dan Perilaku Manajemen Keuangan (*Financial Magement Behavior*).

Soetiono dan Setiawan (2018) menjadikan komponen-komponen tersebut sebagai bagian untuk mengukur tingkat Literasi Keuangan (*Finanacial Literacy*). Penjelasan singkat dari masing-masing komponen dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan Keuangan (*Financial Konowledge*) berkaitan dengan pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan formal, produk dan layanan jasa lembaga keuangan, pengetahuan terkait dengan *delivery channel* dan karakteristik produk.
- 2) Keterampilan dalam Pengelolaan Keuangan (*Financial Skill*) sangat berkaitan dengan kemampuan menghitung produk dan jasa lembaga keuangan, seperti bunga (tabungan atau pinjaman), hasil investasi, dan biaya.
- 3) Keyakinan dalam Penggunaan Keuangan (*Financial Confidence*) berkaitan dengan pengetahuan mengenai lembaga keuangan, produk dan layanan jasa keuangan serta kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan.

4) Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) dapat dikatakan memiliki hubungan yang erat dengan tujuan dan penyusunan rencana keuangan, yang dapat dicerminkan melalui 6 (Enam) Konsep yakni :

- a) *Obsession*, merujuk pada pola pikir seseorang dan persepsinya tentang mengelola uang dengan baik.
- b) *Power*, merujuk dimana seseorang menggunakan uang sebagai alat untuk mengendalikan orang lain dan dapat menyelesaikan masalah.
- c) *Effort*, merujuk pada seseorang yang merasa pantas memiliki uang dari apa yang sudah dikerjakannya.
- d) *Inadequacy*, merujuk pada seseorang yang selalu merasa tidak cukup memiliki uang.
- e) *Retention*, merujuk pada seseorang yang memiliki kecenderungan tidak ingin menghabiskan uang.
- f) *Security*, merujuk pada pandangan seseorang yang sangat kuno bahwa uang lebih baik hanya disimpan sendiri tanpa ditabung di bank atau untuk investasi.

5) Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

Berhubungan dengan tujuan menggunakan produk dan upaya mencapai tujuan keuangan yang ditampakkan melalui seberapa bagus seseorang mengelola uang kas, mengelola utang, tabungan dan pengeluaran lainnya.

Berdasar pada batasan permasalahan pada penelitian ini maka komponen dari Literasi Keuangan (*Financial Literacy*) yang akan dikaji mencakup 3 (Tiga) Komponen yakni :

- 1) Pengetahuan Keuangan (*Financial Konowledge*)
- 2) Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)
- 3) Sikap Keuangan (*Financial Atitude*)

2. Pengetahuan Keuangan (*Financial Konowledge*)

a. Pengertian Pengetahuan Keuangan

Pengetahuan Keuangan (*Financial Konowledge*) dicerminkan oleh pengetahuan dan kemampuan seseorang secara kognitif mengenai keuangan. Kemampuan terhadap Pengetahuan Keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan keuangan yang dimiliki untuk membuat keputusan. Kemampuan tersebut menurut Felisia Anggreni (2022) dapat diukur dengan merencanakan anggaran penghasilan yang akan diterima, biaya yang akan dikeluarkan, kepatuhan terhadap rencana anggaran pengeluaran, pemahaman atas nilai riil dan nominal uang, serta pemahaman tentang inflasi.

Berdasar pada gambaran tersebut maka Vanysha Bertha Ananda (2023) mengemukakan bahwa Pengetahuan Keuangan (*Financial Konowledge*) dapat didefinisikan sebagai sebuah kemampuan untuk mengelola informasi ekonomi, membuat

perencanaan keuangan, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang akumulasi kekayaan, dan juga hutang. Olehnya itu Lisna Devi (2020) menegaskan bahwa individu dengan pengetahuan keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih bijak dalam perilaku keuangannya bila dibandingkan dengan individu yang memiliki pengetahuan keuangan yang lebih rendah.

Sejalan dengan penegasan tersebut Siti Maysarah, (2022) juga mengemukakan bahwa individu dari pelaku usaha yang memiliki pengetahuan keuangan tinggi maka cenderung merasa puas dengan keadaan keuangan yang diperoleh dan mampu menyesuaikan untuk terus meningkatkan kualitas hidup karena mengerti atas keadaan keuangannya saat ini dan cara memperbaikinya.

b. Tujuan dan Manfaat *Financial Knowledge*

Lisna Devi (2020) mengemukakan bahwa tujuan dan mafaat dari Pengetahuan Keuangan (*Financial Konowledge*) antara lain :

- 1) Meningkatkan pengetahuan seseorang yang sebelumnya kurang atau tidak memiliki pengetahuan keuangan menjadi memiliki pengetahuan keuangan dengan baik.
- 2) Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Adapun manfaat dari Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*) bagi masyarakat antara lain :

- 1) Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan.
- 2) Memilih kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
- 3) Terhindar dari aktivitas investasi pada instrument keuangan yang tidak jelas.

c. Indikator Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)

Menurut Briliani (2020) bahwa terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan keuangan yang dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai Tingkat Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*) dari seorang pelaku usaha yakni :

- 1) Pengetahuan Umum Keuangan Pribadi.
Kemampuan dalam menerapkan cara mengelola keuangan yang benar.
- 2) Tabungan.
Kemampuan dalam menyisihkan pendapatan untuk di tabung agar terhindar dari masalah keuangan.
- 3) Pinjaman.
Kemampuan mengoptimalkan pinjaman untuk keperluan yang bermanfaat dan dapat mengelola pinjaman tersebut dengan sebaik mungkin.

4) Investasi.

Kemampuan dalam memahami tentang pentingnya investasi untuk kehidupan yang akan datang.

5) Asuransi.

Kemampuan dalam memahami tentang asuransi, dalam rangka menghindari risiko yang mungkin timbul

3. Sikap Keuangan (*Financial Attitude*)

a. Pengertian Sikap Keuangan (*Financial Attitude*)

Anwar & Leon (2022) menjabarkan dalam penelitiannya bahwa sikap merupakan penggambaran kepribadian diri baik secara fisik maupun pikiran terhadap keadaan atau objek tertentu. Sehingga dari penjelasan tersebut Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dari seseorang atau pendapat maupun penilaian yang diberikan terhadap uang, dimana dalam hal ini uang dipersepsikan sebagai sumber kekuatan dan kebebasan, prestasi, ataupun sumber kejahatan yang diterapkan atau diaplikasikan kedalam sikap.

Individu yang memiliki kemampuan dalam hal Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) dapat menentukan bagaimana sikap dan perilaku mengenai hal yang berhubungan dengan keuangan seperti pengelolaan, penganggaran maupun keputusan yang akan diambil. Hal ini dikarenakan adanya

tujuan yang dicapai dalam merencanakan keuangan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.

Olehnya itu Humaira & Sagoro (2018) menekankan bahwa Sikap Keuangan (*Financial Atitude*) adalah gambaran dari keadaan pikiran, serta penilaian tentang keuangan pribadi yang diaplikasikan ke dalam sikap untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat.

b. Konsep Sikap Keuangan (*Financial Atitude*)

Soetiono dan Setiawan (2018) menjelaskan bahwa Sikap Keuangan (*Financial Atitude*) dapat dicerminkan oleh enam konsep berikut, yaitu:

- 1) *Obsession*, merujuk pada pola pikir seseorang tentang masa depan untuk mengelola uang dengan baik.
- 2) *Power*, merujuk dimana uang sebagai alat untuk mengendalikan orang lain dan dapat menyelesaikan masalah.
- 3) *Effort*, merujuk pada seseorang yang merasa pantas memiliki uang dari apa yang sudah dikerjakannya.
- 4) *Inadequacy*, merujuk pada seseorang yang selalu merasa tidak cukup memiliki uang.
- 5) *Retention*, merujuk pada seseorang yang memiliki kecenderungan tidak ingin menghabiskan uang.

- 6) Security, merujuk pada anggapan bahwa uang lebih baik hanya disimpan sendiri tanpa ditabung di Bank atau untuk investasi.

c. Indikator Sikap Keuangan (*Financial Attitude*)

Beberapa kajian teori tentang Sikap Keuangan (*Financial Attitude*) pada dasarnya memiliki indikator tersendiri, Hanya saja jika merujuk pada pengembangan usaha BUMDes, maka dimensi yang digunakan sebagai indikator sebagaimana dikemukakan oleh Humaira & Sagoro (2018) terdiri dari :

1) *Power-Prestige*

Uang sebagai sumber kekuasaan, pencarian status, alat untuk memperoleh pengakuan dari individu lain, persaingan, dan kepemilikan barang mewah.

2) *Retention Time*

Uang adalah faktor penting dalam kehidupan yang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan masa depan melalui perencanaan yang matang dan berhati-hati saat membelanjakannya.

3) *Distrust*

Uang bisa menjadi sumber kecurigaan dan menimbulkan keraguan serta ketidakpercayaan dalam pengambilan keputusan saat penggunaannya.

4) *Quality*

Uang merupakan sebuah simbol kesuksesan atau simbol kualitas hidup yang mencerminkan prestasi seseorang.

5) *Anxiety*

Uang digambarkan sebagai penyebab kegelisahan yang bisa menimbulkan stress bagi pemiliknya.

4. Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

a. Pengertian Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*) merupakan ilmu yang menjelaskan mengenai pengambilan keputusan yang rasional terhadap keuangan dan perilaku seseorang dalam mengatur keuangan, baik itu dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan individu. Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*) pada dasarnya berhubungan dengan tanggung jawab seseorang terhadap pengelolaan uang dan asset lainnya. Tujuan utama dalam pengelolaan keuangan adalah untuk memastikan bahwa individu mampu mengelola keuangan dan kewajibannya secara baik, (Almaidah Ana Oktavia Besri, 2018).

Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*) menurut pandangan dari Humaira & Sagoro (2018) merupakan sebuah konsep penting pada disiplin ilmu keuangan, sebab menggambarkan tentang perilaku seseorang dalam mengatur keuangan mereka dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan

individu. Selain itu juga dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan keuangan, harmonisasi motif individu dan tujuan perusahaan. Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*) juga berkaitan dengan bentuk efektivitas manajemen dana yakni sebuah konsep yang mengatur dimana arus dana harus diarahkan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu usaha atau lembaga.

Sementara Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*) berdasarkan pandangan dari Jazuli (2019) merupakan suatu tata kelola yang dilakukan oleh seseorang dalam memanfaatkan atau menggunakan keuangan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara efektif. Tata kelola ini meliputi kemampuan berhati-hati agar dalam penggunaan aspek keuangan yang dimiliki sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan atau dengan kata lain digunakan dengan semestinya sehingga kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang bisa terpenuhi.

Anggraeni (2019) memberikan persepsi berbeda dimana menurut pandangannya bahwa konsep Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*) merupakan dampak dari besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatannya. Olehnya itu tidak dapat

dilepaskan dari tanggung jawab seseorang terkait cara mengelola keuangan.

Tanggung jawab dalam hal keuangan merupakan proses mengelola keuangan serta proses menguasai penggunaan aset keuangan maupun aset-aset lain dengan produktif, sehingga bentuk Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*) yang baik dapat dilihat dari bagaimana seseorang mampu menyusun kegiatan perencanaan-perencanaan berkaitan dengan pengelolaan dan juga kontrol terhadap keuangan secara sehat dengan berdasar pada skala prioritas kebutuhan.

b. Tujuan dan Fungsi *Financial Behavior*

Rizkiawati, dan Asandimitra (2018) mengemukakan bahwa *Financial Behavior* atau Perilaku Keuangan bertujuan untuk mengelola keuangan dengan membuat berbagai kebijakan dalam pengadaan, penggunaan keuangan guna mewujudkan kegiatan perencanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan itu sendiri.

Fungsi *Financial Behavior* atau Perilaku Keuangan yang dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan yakni :

- 1) Perencanaan keuangan dengan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta aktivitas lainnya untuk periode tertentu.

- 2) Penganggaran keuangan berupa tindakan lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
- 3) Pengelolaan keuangan dengan memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
- 4) Penyimpanan keuangan dengan cara mengumpulkan dana serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut.
- 5) Pengendalian keuangan berupa evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan.
- 6) Pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
- 7) Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan sekaligus sebagai bahan evaluasi.

c. Indikator Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

Savin R B N (2022) mengemukakan bahwa indikator Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*) antara lain :

1) *Consumption*

Konsumsi, adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat atas berbagai barang dan jasa.

2) *Cash-Flow Management*

Arus kas adalah indikator utama dari kesehatan keuangan yaitu ukuran kemampuan dari pelaku UMUM untuk membayar segala biaya yang dimilikinya.

3) *Saving*

Saving yang dimaksudkan adalah kemampuan dari masyarakat untuk menyisihkan sebahagian dari pendapatan yang diperoleh dan tidak digunakan dalam periode tertentu.

4) *Investmen*

Investasi, yakni mengalokasikan atau menanamkan sumber daya dengan tujuan mendapat manfaat di masa mendatang, dalam artian bahwa ukuran perilaku yang diharapkan dari masyarakat yakni adanya kemauan untuk menambah investasi terhadap usaha yang dijalankan, apakah itu melalui Modal sendiri atau modal yang berasal dari luar.

5) *Credit Management*

Credit Management atau manajemen utang merupakan ukuran terhadap kemampuan seseorang dalam memanfaatkan utang sehingga tidak menjadi beban usaha yang dapat berakibat pada penurunan usaha,

5. Pengembangan Usaha BUMDes

a. Pengertian BUMDes

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, dalam pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, selanjutnya pada ayat 2 juga

menjelaskan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kemudian dalam ayat 3 di jelaskan pula bahwa usaha yang dikelola bergerak pada bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Keberadaan BUMDes sendiri dimaksudkan untuk menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap pada standar desa. Maksud tersebut pada dasarnya juga ditegaskan oleh Kinasih (2020)

bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan.

Sementara menurut pandangan dari Hafiziah Nazira Putri (2022) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes merupakan suatu lembaga usaha yang dilakukan oleh suatu desa dan memiliki fungsi menghasilkan suatu produksi dalam rangka mendapatkan keuntungan atau laba agar dapat meningkatkan keuangan desa

Pandangan tersebut pada dasarnya mempertegas uraian yang dikemukakan Iyan (2020) bahwa maksud didirikannya BUMDes sebagai lembaga perekonomian di desa pada dasarnya agar nantinya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin dapat dikurangi.

b. Mekanisme Pembentukan BUMDes

Mekanisme secara umum pembentukan BUMDes telah diatur secara tersendiri dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes yang selanjutnya dipertegas dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana terdapat beberapa hal substansi seperti :

- 1) BUMDes dapat dikatakan lebih bersifat kondisional, dimana membutuhkan beberapa prasyarat sebagai dasar tingkat kelayakan dibentuknya sebuah BUMDes.
- 2) BUMDes merupakan sebuah bentuk usaha yang dimiliki oleh desa, sehingga ciri utama kepemilikannya bersifat kolektif, dalam artian bahwa usaha tersebut bukan hanya dimiliki oleh pemerintah juga bukan milik masyarakat, atau individu akan tetapi sebuah usaha yang kepemilikannya atas nama pemerintah desa dan masyarakat.
- 3) Konsep tata kelola BUMDes berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sebuah usaha koperasi dimana asas manfaat hanya dirasakan oleh anggota, akan tetapi dalam BUMDes manfaat diperuntukkan pada semua pihak baik pengelola, masyarakat secara menyeluruh
- 4) Pembentukan sebuah BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris atau dapat diartikan bahwa BUMDes, tidak cukup dilakukan oleh unsur pemerintah saja namun keterlibatan masyarakat juga sangat dibutuhkan

Gambaran tentang prinsip-prinsip yang bersifat substansi tersebut penegasannya dapat dilihat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 3) BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tujuan Pembentukan BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun secara teknis untuk tujuan pendirian BUMDes dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, bahwa tujuan dari pembentukan BUMDes yakni :

- 1) Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 3) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

- 4) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 5) Membuka lapangan kerja.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan, dan pemerataan ekonomi desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.
- 8) Perekonomian pedesaan dengan model BUMDes, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

d. Fungsi BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1, bahwa fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), selain itu, BUMDesa diharapkan pula menjalankan fungsi sebagai:

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran
- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan PADes
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

e. Ciri Khas BUMDes

Aisyatun Nafisah (2023) menjelaskan bahwa BUMDes dalam proses pendiriannya memiliki 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan masyarakat dimana pengelolaannya dilaksanakan secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa dan dari masyarakat melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisainya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa;

- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

f. Typologi BUMDes

BUMDes sesuai dengan Typologinya menurut Suryanto (2018) dapat diklasifikasi menjadi menjadi 5 kategori yaitu:

- 1) BUMDes Rintisan (*Start Up*) artinya setiap desa yang mempunyai BUMDes. Mengelola beberapa unit usaha pastinya masih mencari model kerja per unit usaha yang ada, serta pembagian tugas di masing pengurusnya.
- 2) Tumbuh (*Growth*) dimana BUMDes yang ada berbicara untung rugi dari modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa, karena ketika BUMDes menerima modal artinya ada laporan yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
- 3) Matang (*Mature*) artinya mulai menemukan rule kerja unit usaha BUMDes. Mendapatkan keuntungan yang nantinya dibagi dengan dengan Pemerintah Desa sesuai yang ada di Perdes (Peraturan Desa) tentang BUMDes.
- 4) Maju (*Take off*) artinya BUMDes sudah menemukan rule model kinerja yang paten, sehingga bisa mengambil pekerja dari lokal desa, sebagai kebermanfaatan adanya BUMDesa untuk masyarakat.

- 5) Besar (*Enterprise*) dinyatakan dalam Perdes menyebutkan keuntungan antara BUMDes dan Pemerintah Desa sehingga masuk PAD (Pendapatan Asli Desa), untuk dikembalikan kepada masyarakat.

g. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Sujarweni (2020) menguraikan bahwa untuk pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa dengan berpedoman pada 6 (Enam) prinsip yaitu :

- 1) *Kooperatif*, Semua komponen harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, Semua komponen harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan/kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) *Emansipatif*, Semua komponen harus diperlakukan sama tanpa memadang golongan, suku dan agama.
- 4) *Transparan*, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

- 6) *Sustainable*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

h. Peran BUMDes

Optimalisasi peran dari BUMDes tidak terlepas dari fungsi mengapa lembaga ini dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian di Desa, sebagaimana dikemukakan oleh Nia Febriani (2022) bahwa BUMDes merupakan motor penggerak perekonomian desa dan juga sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong terciptanya percepatan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Memahami Optimalisasi Peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa, diuraikan beberapa indikator utama menurut beberapa fungsi dan peran, yakni :

1) Peranan BUMDes sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator adalah memfasilitasi segala aktivitas usaha yang dijalankan, terutama yang berhubungan dengan masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selain berusaha untuk pemberian fasilitas, BUMDes juga melakukan inisiatif mengupayakan mencari solusi terhadap persoalan yang ada di Desa agar dapat menjadi fasilitator yang baik.

2) Peranan BUMDes sebagai Mediator

Maksudnya adalah BUMDes mensosialisasikan ide-ide perencanaan usaha yang telah ditetapkan BUMDes Murni Jaya dan juga membantu Pemerintah Desa untuk menyelesaikan masalah yang ada terkait pengembangan potensi desa guna meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu BUMDes juga menjembatani masyarakat yang ingin bekerjasama guna meningkatkan ekonomi.

3) Peranan BUMDes sebagai Motivator

Peran BUMDes sebagai motivator ini dianggap sebagai ujung tombak dalam memotivasi masyarakat maupun pemerintah desa untuk lebih membuka *mindsite* tentang pentingnya berwirausaha agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa.

4) Peranan BUMDes sebagai Dinamisator

BUMDes berperan mengoptimalisasikan peningkatan Pendapatan Asli Desa dalam pemantauan kegiatan di ruang lingkup masyarakat yang menempatkan ditengah-tengah masyarakat untuk bisa secara langsung mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dalam kegiatan BUMDes sekaligus bertanggungjawab dalam melayani masyarakat.

Masyarakat menyadari bahwa sebagai partisipan berarti terbentuknya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi yang ada di Desa sekaligus dapat mengontrol lingkungan serta sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah dan ikut berperan menentukan prioritas membangun BUMDes.

i. Pengembangan Usaha BUMDes

Abdul Rahmad Suleman (2020) mengemukakan bahwa BUMDes sebagai salah satu lembaga perekonomian desa, merupakan motor penggerak untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes mempunyai banyak pilihan untuk dijadikan sebagai usahanya yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Produk-produk yang dimiliki juga harus memiliki kelebihan agar tujuan BUMDes dapat tercapai sebagai usaha yang menyejahterakan masyarakat desa. Adapun jenis usaha dan bisnis yang bisa dilakukan oleh BUMDes antara lain:

- 1) Usaha Sosial yaitu usaha yang sangat sederhana dan bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan.

Contohnya dari usaha ini yaitu listrik desa, lumbung, pangan, pengelolaan air minum, dan usaha lain yang berkaitan dengan sumber daya lokal.

- 2) Usaha Penyewaan (*Renting*), dalam usaha penyewaan ini barang bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa yang

bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan.

Contoh : penyewaan alat transportasi, penyewaan alat bangunan penyewaan ruko, dan masih banyak lainnya.

- 3) Usaha Perantara (*Brokering*), pihak BUMDes bisa menjadi perantara atau memberikan jasa layanan pemasaran agar masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produknya Seperti memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat seperti produk pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan,.

- 4) Usaha Bersama (*Bolding*), dalam usaha bersama ini BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat.

Misalnya, Pengelolaan destinasi wisata yang ada di desa kemudian dapat membuka akses bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran dalam usaha tersebut.

- 5) Kontraktor (*Contracting*), dalam jenis ini BUMDes bisa menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas desa, misalnya pelaksanaan proyek desa, pemasok bahan dan material pada proyek desa.

- 6) Keuangan (*Banking*), BUMDes juga bisa menjalankan lembaga keuangan untuk membantu warganya dalam

mendapat akses finansial dengan cara yang cukup mudah dan bunga yang rendah, selain itu dapat mendorong produktivitas usaha yang dimiliki desa dari segi permodalan.

Arief Hudiono (2018) mengemukakan bahwa BUMDes dalam menjalankan usaha yang telah ditetapkan tentunya harus mampu memikirkan asas efektivitas usaha tersebut agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai bentuk persaingan bisnis. Efektif dalam hal ini jika BUMDes mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran seperti : Sosialisasi program, Tujuan program, Pemantauan program, dan Ketepatan sasaran program

Beranjak dari unsur efektivitas inilah kemudian BUMDes dapat mempertimbangkan arah pengembangan usaha yang akan dilakukan. Munawaroh (2019) mengemukakan bahwa pengembangan yang dipertimbangkan dalam pengelolaan BUMDes yakni suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan hidup *life skill* (keahlian hidup) dan potensi-potensi yang ada dimiliki oleh masyarakat, sehingga nantinya akan terjadi perubahan kondisi

perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik.

Sementara tujuan yang dapat dicapai dalam rangka pengembangan usaha dari BUMDes menurut Mujahid Ansori, (2019) terdiri dari :

- 1) Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, dan kemiskinan absolut.
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.
- 3) Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan dari masyarakat yang lemah dan tak berdaya.

j. Indikator Pengembangan Usaha BUMDes

Mengukur pengembangan usaha BUMDes dalam mendukung keajahteraan masyarakat menurut Munawaroh (2019) berorientasi pada *Community Based Management* (CBM) yaitu pendekatan pengelolaan program yang menjadikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya, sehingga indikator yang digunakan terdiri dari :

- 1) Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses dalam pengambilan keputusan terhadap pengembangan usaha yang nantinya akan dilakukan oleh BUMDes.

- 2) Kesenjangan dan Keadilan Gender. dimana semua orang mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pengembangan usaha BUMDes agar dapat menikmati secara adil manfaat tersebut.
- 3) Demokratis setiap pengambilan keputusan terhadap pengembangan usaha BUMDes dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- 4) Transparansi dan Akuntabel, dimana Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan usaha BUMDes dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung gugatkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrative.
- 5) Keberlanjutan setiap pengambilan keputusan dalam pengembangan usaha BUMDes harus berorientasi pada kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga dimasa depan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap kajian tentang Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat Terhadap Pengembangan Usaha Pada BUMDes Desa Rosoan Kec. Enrekang Kab. Enrekang yakni :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

N0	Nama	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rizkyatul Nadhifah, Muhadjir Anwar	2021	<i>Pengaruh Literasi Keuangan Dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi (Studi Pada Warga Desa Sekapuk Kabupaten Gresik)</i>	Hal tersebut menunjukkan warga desa yang akan memberikan investasi pada BUMDES telah memiliki pemahaman tingkat literasi keuangan yang cukup baik, sebab semakin besar juga pengetahuan keuangan yang dimiliki warga desa sehingga semakin tinggi pula tingkat pengambilan keputusan untuk melakukan investasi pada BUMDes yang dilakukan. Serta dengan memiliki literasi keuangan yang tinggi bisa membantu warga desa untuk memperkirakan investasi yang akan diambil dan memastikan strategi yang tepat ketika berinvestasi pada BUMDes guna memperoleh keuntungan di masa depan
2.	Diah Diana Putri, Maheni Ika Sari	2022	<i>Analisa Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Perempuan Di BUMDES</i>	Tingkat <i>Financial Knowledge</i> dari rata-rata masyarakat berada pada angka 33,3% dan hal ini termasuk dalam kategori tingkat literasi keuangan

			<i>Wonoasri</i>	rendah atau berada dibawah standar Literasi Keuangan yaitu <60%. Dapat diindikasikan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang literasi keuangan dalam hal mengelola pengeluaran, pendapatan dan tabungan. Tingkat <i>Financial Behaviour</i> rata-rata masyarakat berada pada angka 25% dan hal ini termasuk dalam kategori tingkat literasi keuangan rendah atau berada dibawah standar Literasi Keuangan yaitu <60% dikarenakan masih kurangnya informasi mengenai kredit, catatan keuangan dan tabungan. Tingkat <i>Financial Attitude</i> rata-rata masyarakat berada pada angka 33,3% dan hal ini termasuk dalam kategori tingkat literasi keuangan rendah atau berada dibawah standar Literasi Keuangan yaitu <60% dikarenakan responden kurang kesadaran untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan
3.	Perwito,	2021	<i>Efek Mediasi</i>	Literasi Keuangan

	Nugraha, Sugiyanto		<i>Perilaku Keuangan Terhadap Hubungan Antara Literasi Keuangan Dengan Keputusan Investasi</i>	berpengaruh positif terhadap Perilaku keuangan. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pengetahuan Masyarakat tentang Literasi Keuangan berada pada kategori <i>Sufficient Lterate</i> , yang artinya bahwa tingkat pemahaman dan Keyakinan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan masih kurang baik, sehingga hal ini sangat mempengaruhi perilaku keuangan mereka Perilaku keuangan, dapat memediasi secara penuh terhadap hubungan antara Literasi keuangan dengan Keputusan investasi. Hal ini dapat dimaknai apabila Pemahaman Masyarakat tentang Literasi Keuangan semakin baik maka dapat berdampak pada prilaku mereka dalam melakukan investasi
4.	Sukma	2023	<i>Dampak</i>	<i>Literasi Keuangan,</i>

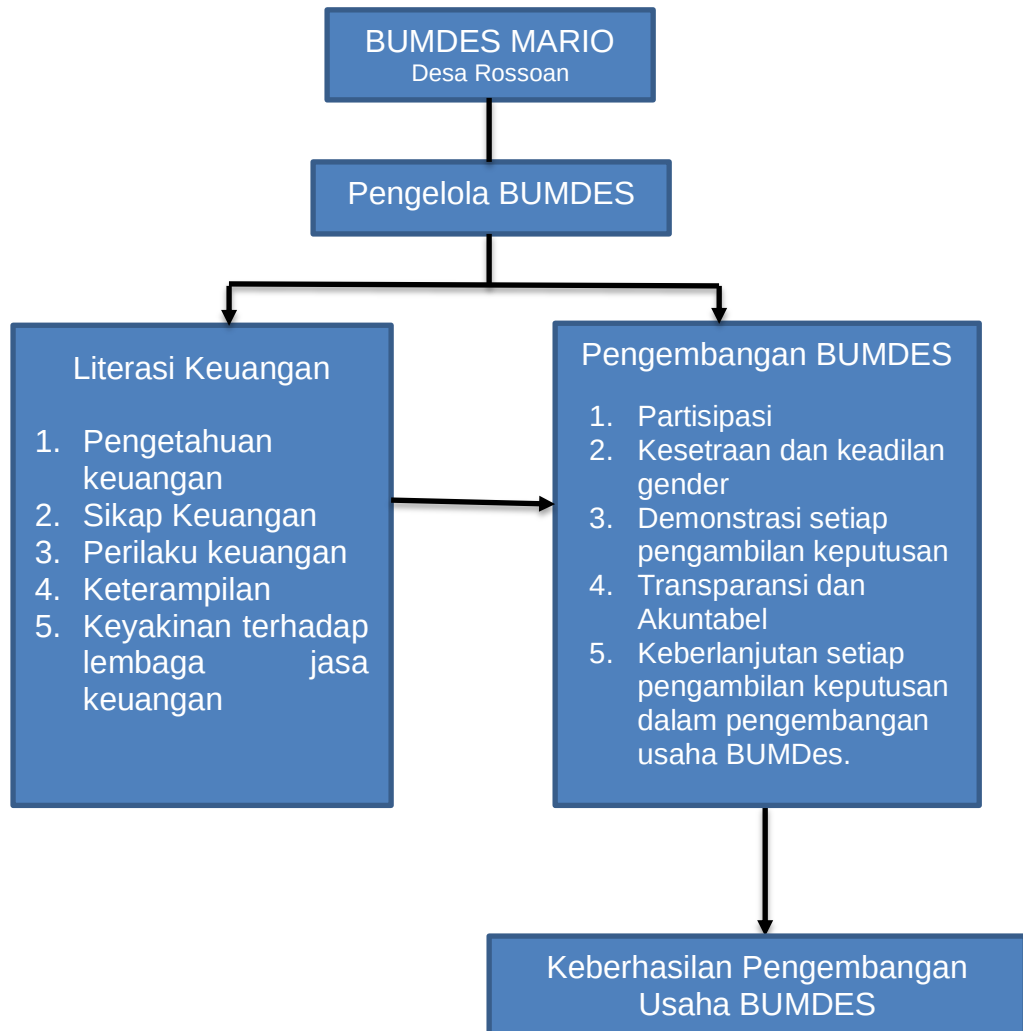
	Irdiana, Kurniawan Yunus Ariyono, Kusnanto Darmawan		<i>Literasi Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Dengan Niat Sebagai Variabel Mediasi</i>	<i>Sikap Keuangan, Perilaku Pengelolaan Keuangan</i> 1) Tidak terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap niat 2) Terdapat pengaruh sikap keuangan terhadap niat 3) Tidak terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan 4) Terdapat pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan 5) Tidak terdapat pengaruh niat terhadap perilaku pengelolaan keuangan 6) Terdapat pengaruh positif literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan melalui niat 7) Terdapat pengaruh positif sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan melalui niat
5.	Marjono Tampubolo n, Rahmadan	2022	<i>Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan</i>	Pengetahuan keuangan berdampak positif dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Hal tersebut

	i		<i>Dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara</i>	menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan menjadi faktor yang dapat membentuk seseorang dalam perilaku manajemen keuangan. Sikap keuangan berlawanan arah atau tidak berdampak positif terhadap perilaku manajemen keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap keuangan tidak semata –mata dapat berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan.
6.	Rina Nurjanah, Siti Surhayani, Neng Asiah	2022	<i>Faktor Demografi, Literasi Keuangan, Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan pada UMKM di Kabupaten Bekasi</i>	Tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan, Tingkat pendidikan yang rendah belum tentu memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang buruk dan begitupun sebaliknya tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang baik. Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Semakin baik tingkat literasi seseorang maka

				semakin baik dalam hal pengelolaan keuangan. Sikap keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Sikap keuangan menunjukkan bagaimana seseorang dalam mengelola keuangannya, semakin baik sikap keuangannya maka semakin baik pula perilaku pengelolaan keuangannya dan begitupun sebaliknya
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dianalisis dalam Kajian ini, maka kerangka konseptual yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2020:9) metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara instrument (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian sosial yang dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Pemilihan lokasi penelitian menurut Sugiyono (2020) harus didasarkan pada beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih sehingga nantinya penelitian akan memperoleh atau menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

Mempertimbangkan kajian teori tersebut dan menyesuaikan permasalahan yang diajukan pada penelitian, maka lokasi yang

menjadi sasaran penelitian yakni BUMDes Desa Rosoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

2. Waktu Penelitian

Sesuai dengan estimasi waktu yang direncanakan, maka untuk melakukan penelitian ini diperkirakan selama 3 (Tiga) bulan dimulai pada bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024.

C. Informan

Tabel 3. 1 Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Marsuki	Kepala Desa
2.	Nurmayani	Ketua BUMDES
3.	Supiani	Bendahara BUMDES

D. Definisi Operasional

1. Literasi keuangan (X). Literasi keuangan BUMDes dalam pengembangan usaha pada BUMDes meliputi kemampuan dan pengetahuan para pengelola BUMDes dalam mengelola keuangan usaha secara efektif dan efisien. Literasi keuangan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

a. Pemahaman Dasar Keuangan

- 1) Pengetahuan tentang konsep-konsep dasar keuangan seperti pendapatan, pengetahuan, laba, dan arus kas.

- 2) Kemampuan untuk membaca dan memahami laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.

b. Pengelolaan Keuangan

- 1) Kemampuan dalam menyusun anggaran dan mengelola keuangan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 2) Keterampilan dalam mencatat dan melacak transaksi keuangan secara sistematis dan akurat.
- 3) Kemampuan untuk mengelola utang dan piutang dengan baik.

c. Perencanaan Keuangan

- 1) Kemampuan untuk merencanakan keuangan jangka pendek dan jangka panjang guna memastikan keberlanjutan usaha.
- 2) Keterampilan dalam merencanakan investasi yang menguntungkan untuk pengembangan usaha.

d. Pengambilan Keputusan Keuangan

- 1) Kemampuan untuk menganalisis informasi keuangan dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis tersebut
- 2) Pemahaman tentang risiko keuangan dan kemampuan untuk mengelola risiko tersebut.

e. Pemahaman Regulasi Keuangan

- 1) Pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan keuangan yang berlaku, termasuk pajak, laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

f. Pengembangan Usaha

- 1) Keterampilan dalam mengidentifikasi peluang pengembangan usaha yang potensial dan mengimplementasikan strategi pengembangan yang efektif.
- 2) Kemampuan untuk mengukur kinerja keuangan usaha dan melakukan evaluasi secara berkala.

Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, pengelolaan BUMDES, diharapkan dapat mengelola keuangan usaha dengan lebih efektif, meningkatkan kinerja keuangan, dan melakukan evaluasi secara berkala.

2. Pengembangan Usaha BUMDes (Y). Pengembangan yang dipertimbangkan dalam pengelolaan BUMDes yakni suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan hidup *life skill* (keahlian hidup) dan potensi-potensi yang ada dimiliki oleh masyarakat, sehingga nantinya akan terjadi perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik.

E Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, penelitian melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara). Baik individu maupun kelompok, jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode observasi dan juga metode survey.

Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi dilapangan. Jadi penulis meninjau langsung ke BUMDES Mario Rosoan untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang di lihat dan sesuai dengan kenyataannya.

Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan ;isan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Ketua BUMDES, dan Bendahara BUMDES untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020) merupakan langkah strategis yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian, sebab salah satu tujuan utama dari sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode antara lain :

1. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terpimpin. Arikunto, (2013:199) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah yang dilakukan dengan

mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan terkait hal-hal yang berhubungan penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dilokasi, dengan mendapatkan data akurat berupa gambar dilapangan.

G. Teknik Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono : 2020) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan yang dapat dijabarkan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono : 2020) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. *Data Collection* atau Pengumpulan data. Di dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau menggunakan gabungan

ketiganya (triangulasi). Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

- b. *Data Reduction* atau reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama melakukan penelitian di lapangan data yang diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, memudahkan pencarian data jika diperlukan. Didalam penelitian ini memudahkan dalam penyeleksian data yang dianggap penting atau data yang tidak perlu serta kurang relevan.
- c. *Data Display* atau penyajian data. Tahap mendisplaykan data. Data dalam pendidikan kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan tabel.
- d. *Conclusion Drawing* atau *verification*. Langkah ke empat dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikembangkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan penelitian kualitatif kesimpulan yang didapat bisa berkemungkinan untuk dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Apabila kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa dari masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

Harapan dari penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas setelah dilakukan penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Rosoan

Desa Rosoan merupakan salah satu dari 12 Desa dan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Enrekang, dimana dari jumlah luasan Desa Rosoan sesuai Data Badan Pusat Statistik yakni 13 Km² atau 4.461% dari 291.19 Km² Total Luas Kecamatan Enrekang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten (Perda) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Rosoan, dijelaskan pada Pasal 2 bahwa Desa Rosoan merupakan wilayah Pemerkaratan dari Desa Tokonan yang membawahi 4 (Empat) Dusun antara lain : Dusun Dadeko, Dusun Rosoan, Dusun Laba, Dusun Leon dan Dusun Bok'di

B. Kondisi Geografis Desa Rosoan

Kondisi Geografis dari Kabupaten Enrekang secara umum dapat dikatakan 80% merupakan Daerah Pegunungan, dengan Ketinggian Di atas Permukaan Laut antara 47 hingga 3329, Demikian pula untuk Kecamatan Enrekang sebagai Ibukota Kecamatan berada pada Radius tersebut, yang mana hanya sedikit sekali dari wilayah ini dapat digolongkan sebagai pedataran. Adapun Desa Rosoan sendiri masuk kedalam Kategori Daerah Pegunungan, atau tepatnya Desa ini berada di Balik Buntu Kabobong, yang merupakan salah satu objek wisata terkenal di Kabupaten Enrekang.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten (Perda) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Rosoan dijelaskan pula bahwa Ibukota dari Desa Rosoan berada di Dusun Rosoan, kemudian selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan tentang batas-batas dari Wilayah Desa Rosoan terdiri dari :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tanete dan Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tobalu Kecamatan Enrekang
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bamba Puang Kecamatan Anggeraja

Adapun penggambaran terhadap Peta Wilayah Kabupaten Enrekang terhadap semua Desa dan Kelurahan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kecamatan Enrekang



Sumber : Kantor Kecamatan Enrekang

Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km dari Ibukota Kecamatan, dan Desa Rosoan sendiri memiliki jarak sejauh 19 Km, atau berada di urutan ke Tiga Desa terjauh dari Ibukota Kecamatan. Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Juppandang	1	4	Karueng	3	5
Galonta	1	3	Cemba	5	8
Puserren	2	5	Ranga	8	12
Lewaja	3	4	Tungka	12	15
Leoran	3	1	Kaluppini	13	15
Tuara	9	12	Buttu Batu	13	17
			Tokkonan	15	17
			Lembang	15	17
			Temban	15	19
			Rosoan	19	21
			Tallu Bamba	20	23
			Tobalu	50	52

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

C. Kondisi Kependudukan Desa Rosoan

Jumlah Penduduk Desa Rosoan sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 1.328 Jiwa terdiri dari 661 Laki-Laki dan 667 Perempuan. Sementara untuk Tingkat Kepadatan Penduduk di

Desa ini adalah 115 jiwa Per Kilometer. Sementara jika didasarkan pada rentang Usia maka dapat dilihat pada Gambar berikut :

Tabel 4. 2 Kondisi Penduduk Berdasarkan Rentang Umur

Rentang Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Total	Rentang Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-Laki	Perempuan			Laki-Laki	Perempuan	
0 – 4	12	19	31	45 – 49	50	35	85
5 – 9	68	72	140	50 – 54	47	28	75
10 – 14	73	72	145	55 – 59	21	24	45
15 – 19	83	82	165	60 – 64	20	19	39
20 – 24	77	64	141	65 – 69	14	13	27
25 – 29	56	60	116	70 – 74	9	10	19
30 – 34	31	55	86	75 – 79	6	12	18
35 – 39	47	37	84	80 – 84	5	5	10
40 – 44	33	41	74	85 +	15	13	28

Sumber : Profil Desa Rosoan

D. Visi dan Misi Desa Rosoan

1. Visi

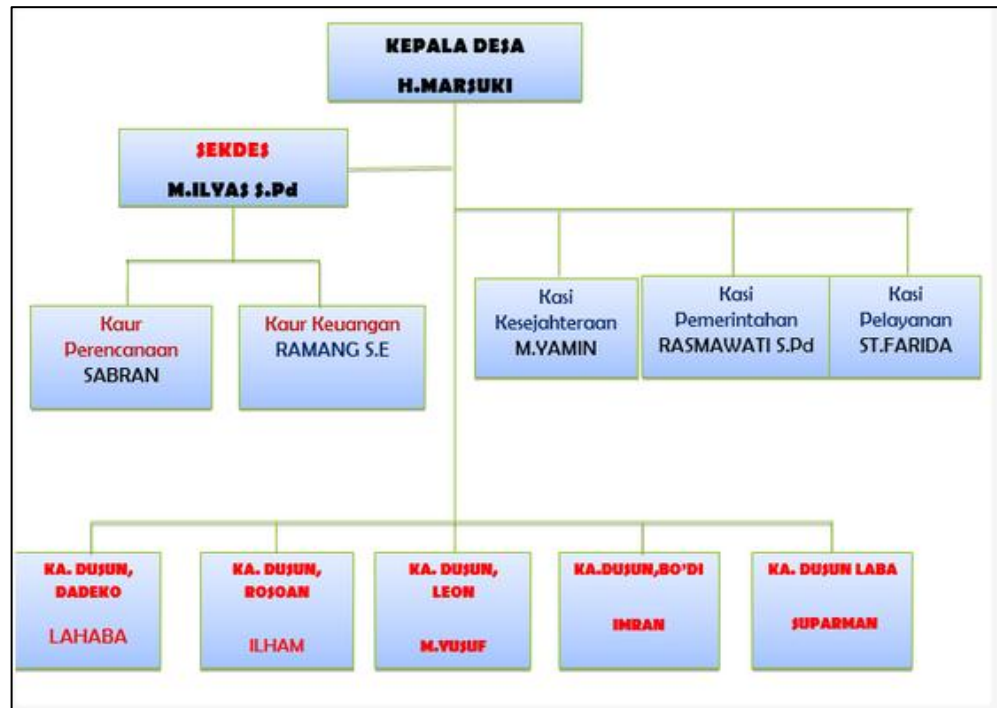
“Mewujudkan Desa Rosoan Lebih Maju, Sejahtera dan Bermartabat serta mengedepankan nilai – nilai Kebersamaan dan Gotong Royong ”

2. Misi

- Melanjutkan Program Pemerintah periode yang lalu sebagaimana yang tertuang dalam RPJMDes
- Peningkatan sumber daya masyarakat
- Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif
- Peningkatan potensi yang ada di desa
- Optimalisasi / Peningkatan pelayanan masyarakat
- Mewujudkan pendidikan masyarakat yang lebih baik
- Meningkatkan sikap kebersamaan dan kegotong royongan
- Peningkatan sarana dan prasarana desa
- Peningkatan pendapatan asli Desa

E. Struktur Organisasi Desa Rosoan

Gambar 4. 2 Struktur Pemerintahan Desa Rosoan



Gambar 4. 3 Struktur Badan Permusyawaratan Desa



Gambar 4. 4 Struktur Badan Usaha Milik Desa Rosoan “BUMDES MARIO” DESA ROSOAN KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Literasi Keuangan Pengelola BUMDES di Desa Rosoan Kabupaten Enrekang

Tingkat literasi keuangan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Rosoan, Kabupaten Enrekang, adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan dan pengembangan BUMDES. Literasi keuangan mencakup pemahaman tentang konsep-konsep dasar keuangan, seperti manajemen anggaran, perencanaan keuangan, dan investasi. Di Desa Rosoan, literasi keuangan pengelola BUMDES mungkin mempengaruhi bagaimana mereka merencanakan dan mengelola dana desa, serta bagaimana mereka membuat keputusan yang berhubungan dengan investasi dan penggunaan sumber daya. Tingkat literasi ini dapat mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDES, yang pada gilirannya berdampak pada keberlanjutan dan kesuksesan usaha desa.

Data mengenai tingkat literasi keuangan pengelola BUMDES di Desa Rosoan dapat diperoleh melalui survei atau penilaian yang melibatkan berbagai indikator. Misalnya, penilaian dapat mencakup pemahaman pengelola tentang perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan keterampilan dalam penggunaan perangkat lunak

akuntansi. Tingkat literasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelola BUMDES dapat mengelola dana dengan efisien, membuat keputusan keuangan yang cerdas, dan melaporkan hasil dengan akurat. Data yang diperoleh dari survei atau penilaian ini bisa digunakan untuk merancang pelatihan dan program pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan keuangan pengelola BUMDES.

Untuk meningkatkan literasi keuangan, langkah-langkah seperti pelatihan dan workshop tentang pengelolaan keuangan, penyuluhan mengenai laporan keuangan, dan pengenalan teknologi keuangan dapat diterapkan. Selain itu, dukungan dari pihak-pihak eksternal seperti pemerintah daerah atau lembaga keuangan dapat memperkuat kapasitas pengelola BUMDES. Dengan meningkatkan literasi keuangan pengelola, diharapkan pengelolaan BUMDES di Desa Rosoan dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Saya mengetahui bahwa laporan keuangan yang tersedia untuk BUMDES mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Namun, saya mengakui bahwa pemahaman saya tentang detail dan analisis laporan-laporan tersebut masih terbatas.”

Pengelolaan keuangan BUMDES Mario Kecamatan Enrekang mengalami kendala signifikan karena pemahaman yang terbatas mengenai laporan keuangan utama, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Meskipun laporan-laporan ini tersedia,

kurangnya pemahaman yang mendalam tentang detail dan analisisnya dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Misalnya, laporan laba rugi yang seharusnya memberikan gambaran tentang profitabilitas usaha dan efektivitas operasional, mungkin tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menilai kinerja finansial BUMDES secara keseluruhan. Tanpa pemahaman yang baik, evaluasi terhadap sumber pendapatan dan beban biaya tidak dapat dilakukan dengan akurat, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan BUMDES untuk merencanakan dan mengelola anggaran secara efisien.

Selanjutnya, kurangnya pemahaman mengenai neraca juga menjadi masalah utama. Neraca, yang mencerminkan posisi keuangan pada titik waktu tertentu, penting untuk memantau aset, kewajiban, dan ekuitas BUMDES. Jika pengelola tidak dapat menganalisis perubahan dalam aset dan kewajiban, mereka mungkin kesulitan dalam menentukan apakah organisasi berada dalam posisi keuangan yang sehat atau perlu penyesuaian strategi keuangan. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan keputusan yang salah dalam hal investasi, pengeluaran, atau manajemen utang, yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan dan pertumbuhan BUMDES.

Akhirnya, pemahaman yang terbatas tentang laporan arus kas juga menghambat pengelolaan keuangan yang efektif. Laporan arus

kas yang menggambarkan aliran uang masuk dan keluar sangat penting untuk memastikan likuiditas dan keberlanjutan operasional BUMDES. Ketidaktahuan tentang bagaimana mengelola dan merencanakan arus kas dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek, seperti pembayaran gaji atau pembelian bahan baku. Akibatnya, BUMDES mungkin mengalami masalah dalam menjaga stabilitas keuangan dan mengatasi ketidakpastian yang timbul dari fluktuasi pendapatan atau pengeluaran. Untuk mengatasi kelemahan ini, penting bagi pengelola untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang analisis laporan keuangan dan penerapan praktik pengelolaan keuangan yang baik.

“Saat ini, saya mengakui bahwa efektivitas saya dalam menyusun dan mengelola anggaran tahunan BUMDES masih kurang optimal. Sering kali saya menemui kesulitan dalam merencanakan alokasi dana secara tepat dan dalam memonitor realisasi anggaran sesuai dengan rencana awal.”

Pengelolaan keuangan yang kurang efektif di BUMDES Mario Kecamatan Enrekang dapat diteliti dari beberapa aspek utama yang menjadi kelemahan dalam praktik pengelolaan anggaran mereka. Pertama, dalam proses penyusunan anggaran tahunan, tampak ada ketidakoptimalan dalam merencanakan alokasi dana. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya data atau informasi yang memadai mengenai kebutuhan dan prioritas pengeluaran. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak serta

mengestimasi biaya secara akurat mengakibatkan anggaran yang disusun tidak sesuai dengan realitas, sehingga mengganggu efektivitas penggunaan dana dan pencapaian tujuan BUMDES.

Kedua, tantangan dalam memonitor realisasi anggaran menjadi masalah signifikan dalam pengelolaan keuangan BUMDES Mario. Monitoring yang tidak memadai dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana awal dan pelaksanaan aktual. Ketika pengeluaran tidak dipantau dengan ketat, kemungkinan terjadinya pemborosan atau penyimpangan anggaran meningkat, yang berdampak negatif pada keberlanjutan finansial dan efektivitas program-program yang dijalankan. Ini mencerminkan kurangnya sistem pengawasan internal yang kuat dan ketidakmampuan dalam menindaklanjuti penyimpangan anggaran secara proaktif.

Ketiga, kesulitan dalam merencanakan dan memonitor anggaran ini juga mencerminkan adanya kekurangan dalam kapasitas dan keterampilan manajerial di tingkat pengelola BUMDES. Tanpa pelatihan atau pengalaman yang memadai dalam pengelolaan keuangan, pengelola mungkin kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan dalam menggunakan alat bantu yang diperlukan untuk pengendalian anggaran. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan agar pengelola BUMDES Mario dapat mengelola anggaran secara lebih

efisien dan efektif, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

“Saya merasa bahwa pengetahuan dan keterampilan saya dalam mengelola keuangan BUMDES masih perlu ditingkatkan. Meskipun saya memiliki pemahaman dasar tentang keuangan, saya menyadari pentingnya pelatihan lebih lanjut untuk mengelola keuangan BUMDES dengan lebih baik”

Kelemahan dalam pengelolaan keuangan BUMDES Mario di Kecamatan Enrekang dapat terlihat dari penilaian pengelolanya yang menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada pemahaman dasar tentang keuangan, kekurangan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam manajemen keuangan BUMDES menunjukkan adanya tantangan signifikan. Hal ini mencakup kurangnya pemahaman mengenai perencanaan anggaran yang efektif, pengendalian biaya, serta teknik akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai. Tanpa keterampilan dan pengetahuan yang memadai, pengelola mungkin kesulitan dalam membuat keputusan finansial yang tepat, yang dapat berdampak pada kestabilan dan keberlanjutan finansial BUMDES.

Selanjutnya, kebutuhan untuk pelatihan lebih lanjut menunjukkan adanya kelemahan dalam kapasitas internal BUMDES Mario dalam hal pengelolaan keuangan. Keterbatasan pelatihan dan pendidikan terkait keuangan dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam menerapkan praktik terbaik dan standar

akuntansi yang diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Hal ini bisa mengarah pada kesalahan dalam pencatatan transaksi, pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan yang akhirnya dapat menurunkan kepercayaan stakeholder dan mengurangi efektivitas operasional BUMDES secara keseluruhan.

Akhirnya, kurangnya pelatihan spesifik juga dapat mempengaruhi kemampuan pengelola dalam menilai dan mengelola risiko keuangan yang mungkin timbul. Pengelolaan risiko yang tidak memadai dapat menyebabkan kerugian finansial yang tidak terduga, masalah likuiditas, atau bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, BUMDES Mario perlu fokus pada pengembangan kapasitas melalui pelatihan yang relevan, penggunaan sistem keuangan yang terintegrasi, dan penerapan prosedur kontrol yang ketat untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan profesional.

“Menurut saya, pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk kesuksesan BUMDES. Keuangan yang dikelola dengan baik akan memungkinkan BUMDES untuk beroperasi secara efisien, membuat keputusan yang lebih baik, dan memastikan keberlanjutan program-program yang dijalankan”

Jawaban dari pengelola BUMDES Mario Kecamatan Enrekang yang menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola keuangan masih perlu ditingkatkan menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam

pengelolaan keuangan BUMDES tersebut. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama. Pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai dalam manajemen keuangan merupakan masalah besar. Meskipun pengelola memiliki pemahaman dasar tentang keuangan, ketidakmampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan secara efektif dapat menyebabkan pengelolaan dana yang tidak efisien. Ini termasuk pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, dan pembuatan laporan keuangan yang akurat. Tanpa keterampilan yang memadai, pengelolaan keuangan BUMDES berisiko menghadapi masalah seperti pemborosan, penggelapan, atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan.

Kedua, kekurangan dalam pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan kapasitas menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan. Pelatihan lebih lanjut sangat penting untuk memastikan bahwa pengelola BUMDES tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan. Tanpa pelatihan yang memadai, pengelola mungkin tidak menyadari teknik terbaru dalam manajemen keuangan atau perubahan dalam regulasi yang dapat mempengaruhi cara mereka mengelola dana. Hal ini juga mencakup pemahaman mengenai penggunaan software akuntansi atau sistem

pelaporan yang dapat mempermudah proses pengelolaan keuangan.

Terakhir, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan atau tantangan baru dalam pengelolaan keuangan dapat menghambat kemajuan BUMDES Mario. Dalam konteks pengelolaan keuangan, dinamika pasar, perubahan peraturan, atau kebutuhan masyarakat yang berkembang memerlukan penyesuaian strategi keuangan yang efektif. Kurangnya pengetahuan terkini dan keterampilan untuk menghadapi perubahan ini bisa mengakibatkan pengelolaan yang ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan kondisi terkini. Oleh karena itu, pengelola BUMDES Mario perlu berkomitmen untuk mengikuti pelatihan yang relevan dan terus-menerus mengembangkan keterampilan mereka untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan BUMDES dicatat dengan benar dan transparan, saya akan mengimplementasikan sistem pencatatan yang terstruktur dan mengadopsi praktik-praktik akuntansi yang baik. Selain itu, saya akan melakukan audit internal secara berkala dan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk memverifikasi laporan keuangan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.”

Dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan yang belum efektif di BUMDES Mario Kecamatan Enrekang, langkah pertama yang perlu diambil adalah implementasi sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Sistem ini harus mencakup pemisahan antara transaksi yang berbeda untuk memastikan setiap transaksi

dicatat secara akurat dan konsisten. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang tepat dapat membantu dalam mengotomatisasi proses pencatatan, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta memudahkan pelacakan dan pelaporan. Dengan sistem ini, setiap pengeluaran dan pemasukan bisa dilihat secara jelas dan terperinci, yang akan mempermudah dalam mengevaluasi kesehatan keuangan BUMDES dan membuat keputusan yang berbasis data.

Selanjutnya, adopsi praktik-praktik akuntansi yang baik merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan BUMDES tidak hanya akurat, tetapi juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Praktik-praktik ini mencakup penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang umum diterima, seperti pencatatan transaksi berdasarkan accrual basis dan pemeliharaan buku besar yang teratur. Penting juga untuk memastikan bahwa semua catatan keuangan didukung dengan bukti yang valid, seperti kuitansi dan faktur, dan bahwa setiap transaksi diverifikasi sebelum dicatat. Melalui praktik-praktik ini, transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan, yang akan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan dan masyarakat.

Terakhir, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan audit internal secara berkala dan melibatkan pihak ketiga independen untuk memverifikasi laporan keuangan sangat krusial. Audit internal akan memberikan tinjauan mendalam terhadap

proses dan praktik keuangan yang ada, mengidentifikasi potensi kelemahan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Melibatkan pihak ketiga independen dalam audit eksternal menambah lapisan verifikasi tambahan, memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari bias dan manipulasi. Dengan kedua langkah ini, BUMDES Mario tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan stakeholder terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga tersebut.

2. Literasi keuangan pengelola BUMDES dalam keberhasilan pengembangan usaha di BUMDES Desa Rosoan Kabupaten Enrekang

Literasi keuangan bagi pengelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pengembangan usaha di desa. Di BUMDES Desa Rosoan, Kabupaten Enrekang, pengelola yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang keuangan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi anggaran, perencanaan investasi, dan manajemen risiko. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep seperti arus kas, laporan laba rugi, dan neraca, pengelola dapat mengelola sumber daya keuangan dengan lebih efisien dan memastikan keberlanjutan usaha yang dijalankan.

Selain itu, literasi keuangan juga berhubungan dengan kemampuan pengelola BUMDES dalam merencanakan dan mengevaluasi program-program usaha. Pengelola yang terampil dalam analisis keuangan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk pengembangan usaha, memonitor kinerja keuangan secara rutin, serta menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan hasil evaluasi. Kemampuan ini penting untuk mengidentifikasi peluang pasar, menetapkan harga yang kompetitif, dan mengelola biaya operasional agar tetap dalam batas yang wajar.

Akhirnya, literasi keuangan yang baik di kalangan pengelola BUMDES dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan pemahaman yang baik tentang laporan keuangan dan proses audit, pengelola dapat memberikan laporan yang jelas dan akurat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ini tidak hanya membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDES, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Masyarakat terlibat dalam berbagai cara, seperti memberikan ide dan masukan dalam rapat, berpartisipasi dalam kegiatan BUMDES, serta membantu dalam pelaksanaan program-program yang ada. Kami juga sering mengadakan diskusi terbuka untuk memastikan semua orang bisa berkontribusi.”

Pengelolaan keuangan BUMDES Mario Kecamatan Enrekang menunjukkan bahwa meskipun masyarakat terlibat dalam berbagai cara, efektivitas pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat yang diuraikan mencakup pemberian ide dan masukan dalam rapat, partisipasi dalam kegiatan BUMDES, serta bantuan dalam pelaksanaan program-program. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas BUMDES. Namun, keterlibatan ini mungkin belum terintegrasi secara menyeluruh dengan pengelolaan keuangan yang lebih strategis dan terstruktur.

Dalam konteks pengelolaan keuangan, keterlibatan masyarakat dalam rapat dan diskusi terbuka adalah langkah positif. Namun, untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, diperlukan sistem dan prosedur yang jelas dan transparan. Diskusi terbuka dan rapat dapat menghasilkan ide-ide inovatif, tetapi tanpa adanya sistem yang solid untuk mengelola dan memantau alokasi dan penggunaan anggaran, risiko terjadinya kesalahan atau penyimpangan keuangan tetap ada. Oleh karena itu, penting bagi BUMDES Mario untuk mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang baik, termasuk pelaporan keuangan yang rutin dan pengawasan yang ketat.

Selain itu, meskipun masyarakat berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, peran serta mereka dalam aspek pengelolaan keuangan seperti perencanaan anggaran, pelaporan, dan evaluasi belum tentu optimal. Pengelolaan keuangan yang efektif memerlukan keterlibatan dalam proses yang lebih mendalam, seperti penyusunan anggaran yang realistis, pemantauan pengeluaran, dan penilaian hasil. Oleh karena itu, BUMDES Mario perlu memastikan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas kontribusi ide, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam aspek pengelolaan keuangan yang lebih konkret dan terukur.

Pengelolaan keuangan dalam pengembangan usaha BUMDES Mario di Kecamatan Enrekang tampaknya belum efektif jika dilihat dari perspektif keterlibatan gender yang diungkapkan dalam pernyataan bahwa

“kami memastikan bahwa semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.”

Pernyataan ini menunjukkan upaya yang baik dalam mendorong partisipasi yang setara di antara pria dan wanita. Namun, efektivitas pengelolaan keuangan tidak hanya bergantung pada kesempatan partisipasi yang setara, tetapi juga pada bagaimana pengelolaan dana dan alokasi sumber daya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kesetaraan gender dalam partisipasi adalah langkah awal yang penting, tetapi tidak cukup jika

sistem pengelolaan keuangan tidak mendukung praktik-praktik yang efisien dan berkelanjutan.

Dalam prakteknya, pengelolaan keuangan yang efektif memerlukan sistem yang jelas dan terstruktur untuk perencanaan anggaran, pelaporan, dan pemantauan keuangan. Hal ini mencakup pengaturan yang transparan mengenai alokasi dana, pengawasan terhadap penggunaan dana, dan pembuatan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Tanpa adanya struktur dan proses yang jelas, meskipun semua anggota masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, pengelolaan keuangan dapat menjadi tidak terorganisir, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan usaha BUMDES. Efektivitas pengelolaan keuangan akan meningkat ketika seluruh anggota tim memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka dalam kerangka sistem yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, BUMDES Mario harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dengan kebijakan partisipasi yang inklusif. Ini mencakup pelatihan bagi anggota dalam hal keterampilan pengelolaan keuangan, pemantauan dan evaluasi rutin terhadap penggunaan dana, serta pelaporan yang terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, BUMDES tidak hanya akan memastikan bahwa semua orang

memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, tetapi juga akan memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha.

“Kami berusaha untuk selalu mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dalam setiap keputusan, kami melakukan diskusi dan konsultasi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bermanfaat bagi seluruh masyarakat”.

Dalam pengelolaan keuangan BUMDES Mario Kecamatan Enrekang, pendekatan yang diambil sangat menekankan pada prinsip inklusivitas dan keterlibatan masyarakat. Kami selalu berusaha untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat yang kurang mampu, dalam setiap aspek pengembangan usaha. Hal ini mencakup pemilihan proyek dan alokasi anggaran yang tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok saja, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan cara ini, kami memastikan bahwa semua keputusan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan harapan berbagai kelompok masyarakat, sehingga tidak ada yang terabaikan.

Setiap keputusan terkait pengelolaan keuangan BUMDES kami ambil melalui proses diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pihak. Kami percaya bahwa transparansi dalam pengambilan keputusan merupakan kunci untuk mencapai hasil yang optimal dan adil. Diskusi ini melibatkan semua pemangku

kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat, anggota BUMDES, dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan melibatkan berbagai suara dalam proses pengambilan keputusan, kami dapat menyaring berbagai perspektif dan informasi yang mungkin tidak terungkap jika hanya mengandalkan pandangan dari satu pihak saja.

Selanjutnya, melalui proses konsultasi ini, kami juga berupaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Kami melakukan evaluasi berkala untuk memantau dampak dari keputusan-keputusan yang diambil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan cara ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDES, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.

“Kami mengelola dana dan kegiatan dengan cara yang transparan melalui laporan berkala yang dipublikasikan kepada masyarakat. Semua transaksi dan keputusan keuangan juga dicatat dengan baik dan dapat diakses oleh publik untuk memastikan akuntabilitas”

Pengelola BUMDES Mario Kecamatan Enrekang menerapkan prinsip transparansi yang ketat dalam pengelolaan dana dan kegiatan mereka. Setiap transaksi dan keputusan keuangan dicatat secara rinci dan teratur dalam laporan berkala yang dipublikasikan kepada masyarakat. Proses ini tidak hanya mencakup pencatatan

transaksi finansial, tetapi juga mencerminkan komitmen BUMDES untuk memastikan bahwa semua aktivitasnya dapat dipantau dan diakses oleh publik. Laporan tersebut mencakup detail mengenai sumber dan penggunaan dana, yang membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDES.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan ini melibatkan pembuatan dan distribusi laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami. Dengan publikasi laporan secara berkala, pengelola BUMDES memastikan bahwa masyarakat dapat memantau perkembangan dan penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk berbagai kegiatan. Ini juga mencakup penyediaan informasi mengenai keputusan keuangan penting dan perubahannya, yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat atau yang berkepentingan memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, pencatatan yang baik dan akses publik terhadap data keuangan juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan memungkinkan masyarakat untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan, BUMDES Mario Kecamatan Enrekang tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat

kepercayaan masyarakat tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberhasilan dan keberlanjutan usaha BUMDES, melalui pengawasan yang terus menerus dan partisipatif.

“Kami membuat rencana jangka panjang dan mengevaluasi kegiatan secara berkala untuk memastikan bahwa BUMDES dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan untuk memastikan keberlanjutan program.”

Untuk pengembangan usaha BUMDES Mario Kecamatan Enrekang, pengelola menyusun rencana jangka panjang sebagai strategi utama untuk memastikan kesinambungan dan keberhasilan operasional. Rencana jangka panjang ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penentuan visi dan misi, sasaran usaha, serta langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya rencana yang jelas dan terstruktur, BUMDES dapat memantau perkembangan dan melakukan penyesuaian bila diperlukan, sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Evaluasi kegiatan secara berkala adalah bagian integral dari strategi pengelolaan BUMDES. Proses evaluasi ini memungkinkan pengelola untuk menilai efektivitas berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi tantangan atau kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana jangka panjang. Evaluasi yang rutin juga memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan

penyesuaian strategi agar usaha BUMDES tetap relevan dan mampu menghadapi dinamika pasar serta kebutuhan masyarakat.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan tidak dapat diabaikan. Dengan melibatkan masyarakat, BUMDES tidak hanya memperoleh masukan yang berharga dari pihak-pihak yang secara langsung terpengaruh oleh kegiatan usaha, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program. Keterlibatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDES. Dengan cara ini, program yang dijalankan tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari komunitas

B. Pembahasan

1. Tingkat Literasi Keuangan Pengelola BUMDES di Desa Rosoan Kabupaten Enrekang

Tingkat literasi keuangan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Rosoan, Kabupaten Enrekang, merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dan pengembangan BUMDES. Literasi keuangan mencakup pemahaman tentang konsep-konsep dasar seperti manajemen anggaran, perencanaan keuangan, dan investasi. Literasi

keuangan yang tinggi memungkinkan pengelola BUMDES untuk merencanakan dan mengelola dana desa dengan lebih efektif, serta membuat keputusan investasi yang cerdas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang baik berhubungan langsung dengan kemampuan pengelolaan dana yang efisien dan keberhasilan program-program ekonomi desa (Susanti, 2020).

Menurut teori literasi keuangan, pengelolaan keuangan yang baik melibatkan pemahaman mendalam tentang laporan keuangan utama: laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi memberikan gambaran tentang profitabilitas dan efektivitas operasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2018), laporan ini penting untuk mengevaluasi kinerja finansial dan membuat keputusan strategis. Pengelola BUMDES yang memiliki pemahaman yang baik tentang laporan laba rugi dapat mengevaluasi sumber pendapatan dan beban biaya secara lebih akurat, yang berdampak pada efisiensi penggunaan dana.

Di sisi lain, neraca mencerminkan posisi keuangan pada suatu titik waktu tertentu. Menurut Arens dan Loebbecke (2019), neraca penting untuk memantau aset, kewajiban, dan ekuitas. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai neraca, pengelola BUMDES mungkin kesulitan dalam menilai kesehatan finansial

organisasi dan merumuskan strategi keuangan yang tepat. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan investasi dan pengeluaran yang kurang optimal, yang berdampak pada keberlanjutan BUMDES.

Laporan arus kas, yang menunjukkan aliran uang masuk dan keluar, juga merupakan komponen krusial dalam pengelolaan keuangan. Penjelasan dari Kieso et al. (2021) menyatakan bahwa laporan arus kas penting untuk memastikan likuiditas dan kelangsungan operasional. Ketidakmampuan dalam merencanakan dan mengelola arus kas dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Ini dapat mengancam stabilitas keuangan BUMDES, terutama dalam menghadapi fluktuasi pendapatan atau pengeluaran.

Dalam konteks pengelolaan anggaran tahunan BUMDES, tantangan yang dihadapi mencakup ketidakefektifan dalam perencanaan alokasi dana dan monitoring realisasi anggaran. Menurut teori manajemen anggaran, perencanaan anggaran yang efektif memerlukan data yang akurat dan pemahaman tentang kebutuhan pengeluaran (Horne dan Wachowicz, 2016). Tanpa kemampuan ini, anggaran yang disusun mungkin tidak mencerminkan realitas kebutuhan BUMDES, yang mengganggu pencapaian tujuan dan keberlanjutan program.

Ketidakmampuan dalam memonitor realisasi anggaran juga menunjukkan kekurangan dalam sistem pengawasan internal.

Penelitian oleh Supriyono (2022) menunjukkan bahwa monitoring yang buruk dapat mengakibatkan pemborosan dan penyimpangan anggaran, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas operasional. Penerapan sistem pengawasan yang ketat dan pelatihan internal dapat membantu dalam mengatasi masalah ini.

Untuk meningkatkan literasi keuangan pengelola BUMDES, pelatihan dan workshop tentang pengelolaan keuangan serta penggunaan perangkat lunak akuntansi adalah langkah penting. Menurut teori pengembangan kapasitas, pelatihan berkelanjutan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengelola dalam menerapkan praktik keuangan yang baik (Suwandi, 2019). Dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga keuangan juga dapat memperkuat kapasitas pengelola BUMDES, memastikan bahwa mereka dapat mengelola dana dengan lebih efisien dan efektif.

Terakhir, implementasi sistem pencatatan yang terstruktur, adopsi praktik akuntansi yang baik, dan pelaksanaan audit internal serta eksternal adalah langkah-langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Praktik-praktik akuntansi yang baik dan audit yang berkala dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan memastikan integritas laporan keuangan BUMDES. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan

pengelolaan keuangan BUMDES di Desa Rosoan dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

2. Literasi keuangan pengelola BUMDES dalam keberhasilan pengembangan usaha di BUMDES Desa Rosoan Kabupaten Enrekang

Literasi keuangan memainkan peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan BUMDES, terutama dalam konteks Desa Rosoan, Kabupaten Enrekang. Pengelola BUMDES yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsep-konsep keuangan seperti arus kas, laporan laba rugi, dan neraca, dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi anggaran, investasi, dan manajemen risiko. Literasi keuangan memungkinkan pengelola untuk merancang strategi yang lebih efektif, memonitor kinerja keuangan secara rutin, serta menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan hasil evaluasi. Dengan demikian, pengelola dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien, memastikan keberlanjutan usaha, dan meningkatkan hasil yang dicapai oleh BUMDES.

Kemampuan untuk melakukan analisis keuangan juga krusial dalam perencanaan dan pengembangan usaha BUMDES. analisis ini melibatkan penilaian laporan keuangan untuk merancang strategi yang efektif dan memonitor kinerja keuangan secara rutin. Kemampuan analisis ini membantu pengelola dalam

mengidentifikasi peluang pasar, menetapkan harga yang kompetitif, dan mengelola biaya operasional. Melalui perencanaan anggaran dan evaluasi hasil, pengelola dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasi dan merancang strategi bisnis yang lebih efektif, mendukung keberhasilan dan perkembangan usaha BUMDES.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap BUMDES. Santosa dan Siti (2017) menjelaskan bahwa pengelola yang memiliki literasi keuangan yang baik dapat menyusun laporan keuangan yang jelas dan akurat, yang dapat diakses oleh publik. Transparansi dalam pencatatan dan pelaporan ini membantu memastikan bahwa sumber daya desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pengelolaan yang transparan, BUMDES dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan BUMDES juga sangat penting. Setiawan (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dan evaluasi program dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program. Diskusi terbuka dan rapat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan

memungkinkan pengelola untuk menyaring berbagai perspektif dan masukan yang berharga. Hal ini membantu dalam memastikan keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Namun, kesetaraan gender dalam partisipasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengelolaan keuangan. Kurniawati (2020) mengungkapkan bahwa walaupun kesempatan partisipasi setara adalah langkah penting, pengelolaan keuangan yang efektif memerlukan sistem yang jelas untuk perencanaan anggaran, pelaporan, dan pengawasan dana. Sistem ini harus memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara efisien dan laporan keuangan disusun dengan akurat. Kesetaraan gender dalam partisipasi adalah langkah awal yang penting, tetapi sistem pengelolaan yang baik diperlukan untuk mendukung praktik-praktik keuangan yang berkelanjutan.

Perencanaan jangka panjang dan evaluasi kegiatan juga merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan BUMDES. Rangkuti (2018) menekankan bahwa perencanaan strategis yang mencakup visi, misi, dan sasaran jangka panjang membantu BUMDES dalam memantau perkembangan usaha dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Evaluasi kegiatan secara berkala memungkinkan pengelola untuk menilai efektivitas

aktivitas, mengidentifikasi tantangan, dan mengevaluasi pencapaian sasaran. Proses ini membantu dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi agar usaha BUMDES tetap relevan dengan perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan melibatkan pembuatan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Prawiro (2019) menekankan bahwa publikasi laporan keuangan secara berkala membantu menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDES. Dengan pencatatan yang baik dan akses publik terhadap data keuangan, masyarakat dapat memantau perkembangan dan penggunaan dana, serta mengurangi potensi penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, BUMDES Mario harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dengan kebijakan partisipasi yang inklusif. Wibowo dan Arianto (2021) menunjukkan bahwa pelatihan dalam keterampilan pengelolaan keuangan, pemantauan dan evaluasi rutin, serta pelaporan yang terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan adalah kunci untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, BUMDES dapat memastikan bahwa semua

anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha.

Evaluasi kegiatan secara berkala dan penyesuaian strategi adalah bagian integral dari pengelolaan keuangan yang efektif. evaluasi rutin membantu pengelola untuk menilai pencapaian sasaran dan mengidentifikasi kendala yang ada. Penyesuaian strategi yang tepat berdasarkan hasil evaluasi memungkinkan BUMDES untuk tetap relevan dengan perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat, sehingga sumber daya dikelola dengan efisien dan strategi usaha selalu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberhasilan program BUMDES. Setiawan (2019) menunjukkan bahwa diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pihak memungkinkan pengelola untuk memperoleh masukan yang berharga dan memastikan keputusan yang diambil dapat diterima serta dilaksanakan dengan baik. Dengan pendekatan yang inklusif, BUMDES dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan memastikan keberlanjutan usaha, sambil menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat literasi keuangan yang rendah di BUMDES Mario Kecamatan Enrekang berdampak signifikan pada efektivitas pengelolaan keuangan mereka. Pemahaman yang terbatas tentang laporan keuangan utama seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas mengakibatkan kesulitan dalam perencanaan anggaran, monitoring realisasi anggaran, dan pengambilan keputusan finansial. Kekurangan pelatihan dan kapasitas manajerial lebih lanjut memperburuk situasi ini, mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan BUMDES. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola dalam pengelolaan keuangan guna memastikan operasional yang efisien dan keberhasilan program desa.
2. Literasi keuangan pengelola BUMDES di Desa Rosoan, Kabupaten Enrekang memainkan peran krusial dalam keberhasilan pengembangan usaha. Pengetahuan yang memadai mengenai arus kas, laporan laba rugi, dan neraca memungkinkan pengelola membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan efisien. Dengan literasi keuangan yang baik, pengelola dapat merancang strategi usaha yang lebih efektif, memonitor kinerja keuangan, dan memastikan keberlanjutan usaha. Selain itu, transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan baik. Meskipun keterlibatan masyarakat dalam rapat dan pelaksanaan program sudah baik, masih perlu perbaikan dalam integrasi keterlibatan ini dengan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur dan sistematis.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDES Mario, disarankan untuk mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur dan menggunakan perangkat lunak akuntansi yang sesuai. Selain itu, adopsi praktik-praktik akuntansi yang baik dan melakukan audit internal secara berkala perlu diutamakan.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDES Mario, disarankan agar dilakukan pelatihan literasi keuangan secara rutin bagi pengelola. Ini akan memperkuat pemahaman mereka mengenai pengelolaan anggaran, perencanaan investasi, dan pengelolaan risiko. Selain itu, perlu diterapkan sistem dan prosedur yang jelas untuk perencanaan anggaran, pelaporan, dan pemantauan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmad Suleman, Erika Revida, dkk., 2020. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa, (Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Akhmad Syarifudin dan Susi Astuti, 2020. Strategi Pengembangan BUMDes dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Pendekatan Social Entrepreneur di Kabupaten Kebumen. Jurnal Research Fair Unisri 2019 Vol 4, Number 1, Januari 2020.
- Almaidah Ana Oktavia Besri, 2018. Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge Dan Locus Of Control Terhadap Financial Management Behavior Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi : Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta
- Aisyatun Nafisah, 2023. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Anggraeni, A. A., & Tandika, D. 2019. Pengaruh Financial Attitude Dan Financial Knowledge Terhadap Financial Management Behavior. JEMMA Journal of Economic, Management and Accounting, 9.
- Anwar, M. R., & Leon, F. M. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Behaviour Pada Generasi Z Di DKI Jakarta. Vol. 8 No. 2, 148
- Aprinthasari, M. N., & Widiyanto. 2020. Pengaruh Literasi Keuangan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Keua Ngan Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Business and Accounting Education Journal, 1(1), 65–72
- Arief Hudiono, 2018. “Efektivitas Program Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa” IAIN PURWOKERTO :2018
- Arikunto, S. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Briliani, Tlirani Rahma. 2020. “Pengaruh Pendapatan, Pengalaman Keuangan Dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga Di Kota Madiun.” Sekolah Tlinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Journal of Business and Banking Volume 9 Number 2 November 2019 – April 2020
- Diah Diana Putri, Maheni Ika Sari, 2022. Analisa Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Perempuan Di BUMDes Wonoasri. Skripsi Fakultas Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jember
- Dudi Irawan, Guruh Wijaya, Ari Eko Wardoyo. 2023. Literasi Keuangan Untuk Pengembangan Bumdes Dengan Pendekatan Teknologi

- Informasi Dan Komunikasi. *Journal of Humanities Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat JHCE* Vol. 1 No. 1, April 2023, hal. 14-18
- Efa Gustina, Chandra Satria, Saprida, 2022. Analisis Pengaruh Motivasi, Komunikasi Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus Desa Ulak Kerbau Lama Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* Vol. 2, No. 1 Maret 2022
- Felisia Anggreni, Simange, Ivonne S. Saerang, Joubert B. Maramis. 2022. Pengaruh Pengetahuan Keuangan Terhadap Pengelolaan Karyawan Single Di Kota Manado Dengan Love Of Money Sebagai Variabel Intervening THE EFFECT O. *Jurnal EMBA* Vol. 10 No, 1, Janauri 2022, Hal. 471-480
- Hafiziah Nazira Putri, Sopyan Resmana, Haura Atthahara, Lina Aryani, 2022. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi (Studi di Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, July 2022, 8 (10), 353-358
- Hambali, Muhammad Yusuf. Dewi, Farida Ratna. 2018. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren di Kecamatan Cibitung Bekasi [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Humaira, I., & Sagoro, E. M. 2018. Pengaruh Pengetahuan Keuangan, dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Perilaku UMKM Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. *Jurnal Nominal* Volume VII Nomor 1 Tahun 2018
- lit Novita Riyanti, Hendri Hermawan Adinugraha, 2021. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul), *Jurnal Al-Idārah* Volume 2, No 1, Februari 2021
- Imam Ghozali, 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS” Edisi Sembilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Iyan, I., Mawung, A. S., & Mantikei, B. 2020. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal of Environment and Management*, 1(2), 103-111.
- Jazuli, Aroh 2019. Pengaruh Locus Of Control, Financial Socialization, Dan Parental Norms Terhadap Financial Management Behavior Dengan Financial Literacy Sebagai Variabel Intervening Pada

- Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Angkatan 2016.
Univesitas Negeri Semarang
- Katadata.co.id. 2023. Indeks Literasi Keuangan Indonesia Naik pada 2023.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/11/ indeks-literasi-keuangan-indonesia-naik-pada-2023>
- Khadijah, N., Rahma, R., & Harun, H. (2024). OPTIMALISASI DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BINA BARUKECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Journal AK-99*, 4(1), 118-127.
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. 2020. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Pemerintah Desa* , Vol 1. Hal 34-44
- Koto, M. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Mahasiswa: Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal Akmami*, Volume 2 Nomor (3), Hal : 645–654.
- Laily, N. 2021. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa dalam Mengelola Keuangan. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(November), 64–72.
- Lisna Devi, Sri Mulyati, Indah Umiyati. 2020. Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Pengalaman Keuangan, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Keuangan. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)* Volume 02 Nomor 02 Tahun 2020. Hal 78-109
- Mardiyatun, N. M. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Apbdes Sekecamatan Menganti Gresik (*Doctoral dissertation, Universitas Wijaya Putra*).
- Marjono Tampubolon, Rahmadani. 2022. Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan Dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi* Vol. 2. No. 1(2022) Hal. 70-79
- Mujahid Ansori, 2019 “Efektivitas Pengelolaan Bumdes Aik Mateng Dalam Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Desa Aik Bual Kecamtan Kopang Kanupaten Lombok Tengah UIN Mataram
- Munawaroh, 2019. Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa. Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

- Nazir, Moh. 2018. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nia Febriani, 2022. Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya. Skripsi : Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020. OJK.go.id : Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Ketiga Tahun 2019. Dirilis pada Tanggal 1 Desember 2020 melalui laman <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022. OJK.go.id : SP 82/DHMS/OJK/XI/2022 tentang Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022. Dirilis pada Tanggal 22 November 2022 melalui laman <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022/SP%20-%20SURVEI%20NASIONAL%20LITERASI%20DAN%20INKLUSI%20KEUANGAN%20TAHUN%202022.pdf>
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa
- Perwito, Nugraha, Sugiyanto, 2021. Efek Mediasi Perilaku Keuangan Terhadap Hubungan Antara Literasi Keuangan Dengan Keputusan Investasi. *Coopetition*, Vol XI, Nomor 2, Juli 2020, 155 – 164
- Pulungan, D. R., & Ndururu, A. 2019. Pengaruh Literasi Keuangan Dan Modal Sosial Terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa. *Seminar Bisnis Magister Manajemen*, 2685–1474, 132–142
- Restia Christianty, Meiske Wenno, Agnes Soukotta, Roy Seleky, Muhammad Faisal, Erfendi Regar. 2023. Membangun Pemahaman Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Keuangan Melalui Pelatihan Literasi Keuangan Di Bumdes Negeri Liliboi. *Community Development Journal* Vol.4, No. 2 Juni 2023, Hal. 4028-4032
- Rina Nurjanah, Siti Surhayani, Neng Asiah. 2022. Faktor Demografi, Literasi Keuangan, Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan pada UMKM di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa-VOL 7 NO. 1–JUNI 2022*

- Rizkyatul Nadhifah, Muhadjir Anwar, 2021. Pengaruh Literasi Keuangan Dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi (Studi Pada Warga Desa Sekapuk Kabupaten Gresik). Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol.14, No.2, Desember 2021, pp. 1 -11
- Rizkiawati, Nur Laili dan Nadia Asandimitra. 2018. Pengaruh Demografi, Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of Control, dan Financial Self-Efficacy terhadap Financial Management Behavior Masyarakat Surabaya. Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.6 No.3
- Rustandi Kartawinata, B., & Ikhwan Mubaraq, M. 2018. Pengaruh Kompetensi Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Bagi Wanita Di Makassar. OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi, II, 87–100
- Savin Riznika Bunga Nusa; Andrieta Shintia Dewi, 2022. Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude Dan Parental Income Terhadap Financial Management Behavior Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta. JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 6 No. 3, 2022
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sukandarrumidi. 2018. *Metodologi Penelitian*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Sukma Irdiana, Kurniawan Yunus Ariyono, Kusnanto Darmawan, 2023. Dampak Literasi Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Dengan Niat Sebagai Variabel Mediasi, Jurnal Ilmiah Global Education JIGE Volume 4 Nomor (2) Tahun (2023); Hal 700-710
- Safryani, U., Aziz, A., & Triwahyuningtyas, N. 2020. Analisis Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Investasi Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 8 (3), 319–332
- Soetiono dan Setiawan, 2018, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Indonesia, Cetakan ke 1 , Rajawali, Depok
- Sujarweni. V. Wiratna. 2019. Akuntansi Desa. Pustaka Baru. Yogyakarta
- Suryanto, R. 2018. Peta Jalan BUMDES Sukses. PT Syncore Indonesia
- Syahrul Efendi, 2019. Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 6 Nomor 4, Bulan Desember Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Vanysha Bertha Ananda, Elvi Rahmi. 2023. Pengaruh Pengetahuan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa. Jurnal Ecogen Universitas Negeri Padang Vol. 6 No. 1 2023 Page 37-44
- Yuwan Lestari, S. (2020). Pengaruh Pendidikan Pengelolaan Keuangan Di Keluarga, Status Sosial Ekonomi, Locus of Control Terhadap Literasi Keuangan (Pelajar Sma Subang). Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 01(02), 69–78.